BENTUK NEGARA PADA ZAMAN PERTENGAHAN

WAHYU PRATAMA

Email: wahyu099pratama@gmail.com

No Bp:2010003600158

Perguruan Tinggi

Universitas Ekasakti-AAI Padang.

Fakultas Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya sedangkan peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isi atau strukturnya.

Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad Pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki Abad Pembaharuan dan Abad Penjelajahan. Sejarah Dunia Barat secara tradisional dibagi menjadi tiga kurun waktu, yakni Abad Kuno, Abad Pertengahan, dan Zaman Modern. Dengan kata lain, Abad Pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari Abad Kuno ke Zaman Modern. Abad Pertengahan masih terbagi lagi

menjadi tiga kurun waktu, yakni Awal Abad Pertengahan, Puncak Abad Pertengahan, dan Akhir Abad Pertengahan.

Dalam makalah ini diterangkan tentang bentuk Negara pada zaman pertengahan yang pernah di terapkan didunia ini.

BAB II PEMBAHASAAN

A. Pengertian Bentuk Negara

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya.

B. Pengertian Bentuk Negara Pada Zaman Pertengahan

Bentuk negara pada jaman pertengahan dikemukakan oleh beberapa ahli sejak akhir jaman pertengahan yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak ahli yang berpaham modern. Pengertian yang dimaksud adalah negara dalam bentuk Kerajaan dan Republik.

Bentuk negara jaman pertengahan menurut para ahli adalah :

1. Machiavelli

Machiavelli mengajarkan bahwa pada intinya negara itu kalau bukan Republik (Republica) tentu Kerajaan (Principal). Menurut Machiavelli negara adalah arti genus, sedangkan Republik dan Kerajaan adalah species.

2. Jelinek

Jelinek memberikan ukuran untuk membedakan negara dalam bentuk Kerajaan dan Republik berdasarkan kemauan negara.

- Dalam negara Kerajaan, pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang dan kemauan negara yang terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu berbadan dan individual.
- Dalam negara Republik, kemauan negara tercapai berdasarkan berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga

kemauan itu tidak terlihat sebagai kemauan satu orang hidup yang tertentu, melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realitas secara yuridis saja.

Paham negara Republik tersebut sekarang tidak dapat diterima lagi. Misalnya, di Inggris, kemauan negara di Inggris tidak ditentukan oleh Raja/Ratu tetapi oleh Parlemen, dan Inggris adalah Kerajaan bukan Republik.

3. Deguit

Deguit membedakan negara dalam bentuk Republik dan Kerajaan berdasarkan cara pengangkatan Kepala Negara, yaitu :

- Apabila Kepala Negara ditunjuk oleh tatanan penggantian secara keturunan yang telah ditetapkan, maka disebut Monarkhi.
- Apabila Kepala Negara dipilih oleh rakyat atau bukan atas dasar keturunan yang telah ditetapkan, maka disebut Republik.

Pendapat dari Deguit tersebut, saat ini juga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena ada kerajaan yang kepala negaranya siangkot secara bergiliran, misalnya Malaysia.

4. Prof. Otto Koellreuter

Prof. Otto Koellreuter menambahkan satu bentuk negara yaitu Otoriter (Autoritarian fuhrerstaat), disamping Kerajaan (Monarkhi) dan Republik. Menurut Prof. Otto, bahwa Monarkhi dalam negara modern dikuasai oleh asas ketidaksamaan seperti Dinasti, sebaliknya Republik dikuasai oleh asas persamaan pemimpin. Negara pemimpin yang otoriter (Autoritarian fuhrerstaat) didasarkan atas pandangan otoritet negara.

Pemimpin negara tidak didasarkan Dinasti dan pandangan persamaan pun tidak dianut, sehingga menurut Prof. Otto perbedaan Monarkhi dan Republik tidak berarti lagi. Prof. Otto seolah menerima bahwa negara otoriter ini didasarkan pada kekuasaan pemimpin, yang siangkotnya sebagai dasar kemauan negara.

Abad Pertengahan Kemunduran Romawi merupakan awal masa abad pertengahan. Pada abad ini ditandai dengan ketidak bebasan pemikiran manusia dalam bingkai agama kristen ortodoks yang sangat dominan. Masa ini memiliki ciri yang khas, bahkan disebut sebagai masa kegelapan bagi perkembangan peradaban manusia (the dark ages).

Pemikir-pemikir yang dianggap mewakili jaman ini adalah; **Agustinus (354-430)** Agustinus merupakan penganut taat agama Kristen yang diangkat menjadi uskup di Hippo Regius di Afrika Utara. Dia menerbitkan dua buah buku yaitu Civitas Dei (negara Tuhan) dan Civitas Terrena (negara setan). Civitas Terrena merupakan kerajaan keduniawian yang penuh dengan perilaku setan. Sedangkan Civitas Dei adalah kerajaan Tuhan yang langgeng dan abadi. Agar kerajaan di dunia, yang merupakan bentuk Civitas Terrena, menjadi baik, maka harus mendapatkan ampunan dari gereja Kristus dan mengabdikan kepada Civitas Dei. Kerajaan Romawi dipandang sebagai bentuk Civitas Terrena oleh Agustinus, dan agar menjadi baik maka pemimpin negara harus memerintah dengan semangat Civitas Dei.

Thomas Aquino (1225 – 1274) Thomas Aquino merupakan pemikir yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles dan pemikiran hukumnya terkenal dengan pemikiran hukum alam thomistis yang kemudian menjadi dasar bagi golongan Katholik Roma. Asas-asas hukum alam dibagi menjadi 2 jenis yaitu;

(1) **Pincipia Prima** (asas-asas umum), adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir berdasarkan rasio yang dimiliki. Asas-asas ini tidak berubah sepanjang waktu.

(2) **Principia Secundaria**, asas-asas ini diturunkan oleh ratio manusia dari principia prima. Karena merupakan tafsiran manusia, maka principia secundaria tidak berlaku mutlak dan berubah menurut waktu dan tempat.

Sedangkan hukum dibagi menjadi empat, yaitu;

- (1) **Lex Aeterna (hukum abadi)**, yaitu hukum Tuhan yang mengatur sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan serta bersifat kekal dan menjadi sumber dari segala sumber hukum.
- (2) **Lex Duvina (hukum ke-Tuhan-an)**, merupakan sebagian kecil rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia (firman Tuhan);
- (3) **Lex Naturalis (hukum Alam)**, adalah sebagian dari lex aeterna dan lex duvina yang bisa ditangkap oleh rasio manusia;
- (4) **Hukum Positif**, adalah hukum yang riil berlaku di masyarakat. Negara menurut **Thomas Aquino** bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, yaitu untuk mencapai kesempurnaan abadi sesuai dengan syarat-syarat agama.

Agar tujuan ini dicapai, diperlukan persatuan dan perdamaian yang dapat terwujud dalam kepemimpinan satu orang. Maka bentuk negara yang sesuai adalah monarki. Kalau menurut Agustinus antara gereja dan negara terpisah sama sekali, maka **menurut Thomas Aquino** negara berada di bawah gereja. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja demi tercapainya Civitas Dei. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah twee zwaarden theorie (teori dua pedang). Satu pedang adalah pedang kerohanian dan pedang yang lain adalah pedang duniawi.

Menurut Paus kedua pedang ini diberikan kepada Paus untuk melindungi agama, kemudian Paus memberikan pedang duniawi kepada Raja. Sehingga Kaisar berkedudukan di bawah Paus. Namun Kaisar memiliki penafsiran sendiri. Menurutnya Kaisar langsung mendapatkan pedang duniawi dari Tuhan tidak dari gereja, sehingga kedudukan Kaisar sejajar dengan Paus. Marsiglio di Padua (1270 – 1340). Marsiglio di Padua, atau yang lebih sering disebut dengan Marsilius dari Padua adalah anggota golongan Gibellin pendukung kaisar Louis Bavaria yang bertentangan dengan paus Johannes XXII.

Negara menurut Marsilius, adalah badan yang hidup bebas dan mempunyai tujuan untuk mempertahankan perdamaian, memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan pada rakyatnya untuk berkembang bebas. Tugas utama negara untuk itu adalah membuat undang-undang demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada lembaga pembuatan undang-undang (legislatur). Pembuatan undang-undang adalah rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Paus juga harus dipilih oleh rakyat.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Abad Pertengahan Kemunduran Romawi merupakan awal masa abad pertengahan. Pada abad ini ditandai dengan ketidak bebasan pemikiran manusia dalam bingkai agama kristen ortodoks yang sangat dominan. Masa ini memiliki ciri yang khas, bahkan disebut sebagai masa kegelapan bagi perkembangan peradaban manusia (the dark ages).

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Bentuk negara pada jaman pertengahan dikemukakan oleh beberapa ahli sejak akhir jaman pertengahan yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak ahli yang berpaham modern. **Machiavelli** mengajarkan bahwa pada intinya negara itu kalau bukan Republik (Republica) tentu Kerajaan (Principal). **Jelinek** memberikan ukuran untuk membedakan negara dalam bentuk Kerajaan dan Republik berdasarkan kemauan negara. **Deguit** membedakan negara dalam bentuk Republik dan Kerajaan berdasarkan cara pengangkatan Kepala Negara. **Prof. Otto Koellreuter** menambahkan satu bentuk negara yaitu Otoriter (Authoritarian fuhrerstaat), disamping Kerajaan (Monarkhi) dan Republik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, *The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon)*, Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, *Jurnal Respublica* Volume 17, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyusur Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

- Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(1).3779).
- Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.